

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1604 / Per-ump / 2013
TANGGAL : 12-2-2013

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH:

NAMA : FENNY ANGGRAINI

NIM : 22 2008 181

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2012



**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH:

NAMA : FENNY ANGGRAINI

NIM : 22 2008 181

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fenny Anggraini

NIM : 22 2008 181

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2012



Fenny Anggraini

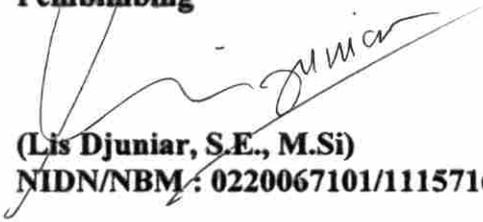
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

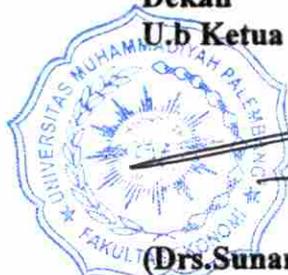
Judul Skripsi :ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PALEMBANG

Nama Mahasiswa : Fenny Anggraini
Nim : 22 2008 181
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal2012
Pembimbing


(Lis Djuniar, S.E., M.Si)
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi



(Drs.Sunardi, S.E., M.Si)
NIDN : 0206046303/784021

Motto Dan Persembahan

- Jangan lihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah disekitarmu dengan penuh kesadaran.
- Kegagalan adalah kerikil-kerikil kecil untuk mencapai suatu keberhasilan.

- *Fenny Aggraini* -

Terucap Syukur kepada-Mu Allah SWT

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- **Saudara-saudara Tersayang**
- **Seseorang Yang Kusayangi Yang selalu Setia
Membantu dan Menemaniku**
- **Almamaterku**



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Selesainya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai pihak yang selalu member bantuan, dorongan, semangat, nasehat dan petunjuk-petunjuk pada penulis. Pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Idris.,S.E.,M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M.Taufik Syamsuddin S.E.,Ak.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs.Sunardi S.E.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly S.E.,M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi serta bapak/ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis dan Staff dan

Karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Lis Djuniar S.E.,M.Si Selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan dan staf karyawan/I Dinas Pendapatan Daerah yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan dan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Ayahanda (M.nur) dan Ibunda (Sulmiati) tersayang yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restunya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluargaku: K'Tatak, K'Totok, Y'encu, Y'ena dan Kakak ipar & ayuk Ipar Ku beserta keponakan-keponakan ku tersayang. Terimakasih untuk do'a dan dukungan kalian.
9. Seseorang yang senantiasa mendampingi ku yudhistira yang tercinta yang telah memberikan doa' dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman Baikku "Emilia, Pera, Sutihat dan Feni Ardini" yang selalu mendukung dan membantu ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman organisasi HMJ/BEM FE UMP, kakak senior, se-angkatan dan junior terima kasih buat dukungannya selama ini.
12. Serta Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu..

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua, Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah S.W.T. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Penulis, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Pajak Reklame.....	10
a. Pengertian Pengertian Pajak Reklame.....	10
b. Objek, Subjek dan Wajib Paja Reklame	11
c. Kontribusi Pajak Reklame.....	12

d. Tarif Pajak Reklame.....	13
2. Pajak Daerah	14
a. Pengertian Pajak Daerah	14
b. Jenis Pajak Daerah	15
c. Unsur-unsur Pajak Daerah	18
d. Fungsi Pajak Daerah.....	20
e. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	20
3. Pendapatan Asli Daerah	21
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	21
b. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah.....	22
c. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	23
d. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat Penelitian.....	27
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data yang Diperlukan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	32

2. Ruang Lingkup Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	33
3. Struktur Organisasi Pembagiaan Tugas	34
a. Struktur Organisasi.....	34
b. Pembagian Tugas	36
c. Hubungan Kerja	47
d. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	49
e. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	49
B. Pembahasan.....	52
1. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	52
2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	28
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2008-2011	53
Tabel IV.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2008-2011	54
Tabel IV.4 Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008-2011	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi

Lampiran 2: Surat Keterangan Riset

Lampiran 3: Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Sertifikat Membaca Al-qur'an

Lampiran 5: Biodata Penulis

ABSTRAK

Fenny anggraini/222008181/2010/Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang dan upaya apakah yang perlu dilakukan dinas pendapatan daerah kota Palembang dalam memperbaiki kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Tujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang dan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan dinas pendapatan daerah kota Palembang dalam memperbaiki kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, tempat penelitian dilakukan di dinas pendapatan daerah kota Palembang, operasional variabel yang digunakan adalah kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat kecilnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan perlu melakukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang

Kata kunci : Pajak Reklame, Pajak Daerah dan PAD.

ABSTRACT

Fenny anggraini/222008181/2010/The Analysis Contribution of Advertising Toward Local Tax Revenue in Increasing Palembang's Revenue.

The problem of this study were how the advertising taxation procedur and it's contribution toward local tax revenue in increasing Palembang's revenue and what efford that should be taken by local Revenue Department Palembang to improve, the advertising taxation procedure and it's contribution toward local tax revenue in increasing Palembang's revenue. The purpose of this study were to find out the advertising taxation procedure and it's contribution toward local tax revenue increasing Palembang's revenue and to find out the effort that was needed by local Revenue Department Palembang to improve the advertising taxation procedure and its contribution toward local tax revenue in increasing Palembang's revenue.

This study was deskriptive study. It was conducted at local Revenue Department Palembang. The operational variables of this study were contribution of advertising toward local tax revenue. The data of this study used primary and secondary data. The technique of analyzing the data used qualitative and quantitative analysis. The analyzing techbique was descriptive qualitative.

The result of the study showed that the problems in advertising taxation in Palembang were the unlisted advertising at local revenue Department and lack of understanding of about taxation procedure.

Key words: Advertising Tax, Local Tax dan PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut suatu daerah berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari pendapatan daerah. Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi pendapatan daerah lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya. Upaya meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga bisa menambah pendapatan daerah.

Pemerintah daerah dituntut agar dapat bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada di daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber daya sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mardiasmo (2002:107) mengatakan bahwa salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu :

1. Pajak daerah.
2. Pembebanan langsung kepada masyarakat konsumen jasa publik.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang merupakan sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari tiga kelompok yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, Yaitu :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah pajak reklame, dasar hukum pengenaan reklame adalah Undang-undang nomor 14 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Kontribusi pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah, jika potensi penerimaan pajak reklame semakin besar dan pemerintah

daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya yaitu target dan realisasi pajak reklame yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah maka akan memberi peluang kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penjelasan pasal 3 tentang subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan penjelasan pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) dinyatakan bahwa dasar pengenaan reklame adalah sewa reklame dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan oleh walikota dengan peraturan daerah.

Peraturan walikota Palembang nomor 14 tahun 2010 pasal 8 tentang persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemungutan pajak reklame dan surat keputusan walikota Undang-undang nomor 14 tahun 2010 pasal 4 ayat (1) tentang dasar pengenaan dan tarif pajak reklame. Tarif pajak reklame kota Palembang adalah sebesar 25%. Menurut peraturan walikota Palembang nomor 14 tahun 2010 dalam pasal 8 ayat (3) disebut bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam daerah Palembang dipungut pajak reklame oleh walikota melalui dinas pendapatan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dinas pendapatan daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam

rangka pemungutan pajak reklame, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur penetapan pemungutan pajak reklame.

Berikut ini adalah persentase perkembangan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2008-2011

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	4.750.000.000	4.138.404.435	87,12
2009	5.250.000.000	4.225.282.834	80,48
2010	6.500.000.000	4.603.540.213	70,82
2011	5.121.951.765	7.937.771.136	154,98

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2012

Berdasarkan pada tabel I.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008-2011 persentase realisasi reklame terhadap penerimaan pajak daerah, pada tahun 2008 persentase realisasi tidak mencapai target sebesar 87,12%, pada tahun 2009 realisasi juga tidak mencapai target sebesar 80,48%, dan pada tahun 2010 persentase realisasi tidak mencapai target sebesar 70,82 sedangkan pada tahun 2011 realisasi mencapai target sebesar 154,98%. Hal ini menggambarkan 3 tahun berturut-turut tidak optimalnya pencapaian kontribusi pajak reklame dan 1 tahun terakhir ini menggambarkan optimalnya

dalam pencapaian kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Palembang Tahun 2008-2011

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	69.350.000.000	69.367.592.779	100,03
2009	87.485.932.360	84.696.563.176	96,81
2010	93.420.835.800	104.047.313.437	111,37
2011	172.117.431.035	207.746.349.410	120,70

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2012

Berdasarkan Tabel I.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008-2011 persentase realisasi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2008 realisasi mencapai target sebesar 100,03%, pada tahun 2009 realisasi tidak mencapai target sebesar 96,81%, pada tahun 2010 realisasi mencapai target sebesar 111,37% dan pada tahun 2011 realisasi mencapai target sebesar 120,70%. Hal ini menggambarkan optimal dan tidak optimalnya pencapaian kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Tabel I.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Kota Palembang
Tahun 2008-2011

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	172.315.274.148	171.383.551.551	99,46
2009	218.592.661.810	170.540.649.161	78,02
2010	210.049.457.241	255.193.654.243	121,49
2011	358.005.164.165	372.978.041.916	104,18

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2012

Berdasarkan Tabel I.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008-2011 persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2008 realisasi tidak mencapai target sebesar 99,46%, pada tahun 2009 realisasi tidak mencapai target sebesar 78,02%, pada tahun 2010 realisasi mencapai target sebesar 121,49% dan pada tahun 2011 realisasi mencapai target sebesar 104,18%. Hal ini menggambarkan optimal dan tidak optimalnya kontribusi pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang

Berdasarkan uraian sebelumnya dan melihat permasalahan yang ada dalam pengolaan kontribusi pajak reklame di kota Palembang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang ?
2. Upaya apakah yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam memperbaiki kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam memperbaiki kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengolahan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota Palembang, sehingga dapat mendorong perusahaan mencapai tujuan di masa yang akan datang.

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan kajian dan berguna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul : “Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palembang dilakukan oleh Dirga Tudes (2007) dengan perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : apakah yang menyebabkan ketidak efektifan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Palembang.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penyebab ketidak efektifan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Palembang. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskripsi. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab ketidak efektifan penerimaan retribusi parker di tepi jalan umum adalah kurangnya pengawasan yaitu penyeteran terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum seringkali adanya penundahan penyeteran yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sehingga petugas bendaharawan bagian penerima tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa besar jumlah pendapatan yang diterima dan pengawasan terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh petugas bagian pengawasan sering kali dilalaikan dan tidak



dilakukan sepenuhnya oleh petugas yang telah di tunjuk sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum kota Palembang. Dampak dari kurangnya pengawasan tersebut banyaknya penyimpangan yang dilakukan oknum juru parkir, akibatnya tidak tercapainya target atau anggaran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Palembang.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah persamaannya yaitu sama-sama meneliti di dinas pendapatan daerah kota Palembang dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai retribusi parkir di tepi jalan sedangkan penelitian ini meneliti mengenai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

B. Landasan Teori

1. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut peraturan daerah Undang-undang nomor 14 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal (1) dinyatakan bahwa pajak reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2010 pasal (2) dan pasal (3) tentang Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame, disebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Marihot (2006: 326) penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

- 1) Reklame papan yaitu reklame yang dari papan, kayu termasuk seng atau bahan yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
- 2) Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan yang sejenisnya dengan itu.
- 3) Reklame melekat (stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak melebihi.
- 4) Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan, diletakan, dipasang atau digunakan pada suatu benda lain.

- 5) Reklame berjalan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- 6) Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, leser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- 7) Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suatu suara yang ditimbulkan dari perantara alat.
- 8) Reklame film atau slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, maupun bahan-bahan yang sejenis, sabagai alat untuk diproyeksikan dan dipancarkan pada layar atau alat lain yang ada diruangan.
- 9) Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

c. Kontribusi Pajak Reklame

Zurniawati (dalam buku Abdul, 2006: 33) menyatakan bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak reklame mempunyai peranan yang cukup besar dalam penerimaan kas daerah. Sebagai salah satu komponen pajak daerah, pajak reklame memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak reklame harus dikelola secara tepat dalam rangka optimalisasi dan

usaha meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan dari pajak reklame maka semakin besar kas untuk pajak daerah dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka ketergantungan kepada pemerintah pusat akan berkurang sehingga pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah.

d. Tarif Pajak Reklame

Menurut peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang pajak reklame dinyatakan bahwa tarif reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif pajak reklame tersebut dalam peraturan daerah.

Menurut Siti (2009 : 20) salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara dalam sektor pajak adalah dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan merupakan konsekuensi dari pemberi kepercayaan kepada wajib pajak, oleh karena itu selain fungsi perlu juga dibarangi dengan upaya penegakan hukum diwujudkan keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber iuran dana kas daerah.
- 2) Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.

- 3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Abdul (2004 : 67) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut Undang-undang Nomor. 14 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 disebutkan bahwa pajak daerah disebut pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa membawa imbalan langsung yang seimbang, yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Dasril (2004 : 141) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua Negara. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perpajakan di semua negara yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengolahan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan mengenai definisi pajak adalah pajak yang merupakan iuran wajib bagi orang atau badan kepada Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, dimana hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)

b Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2010 pasal 8 (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota terdiri dari :

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan

oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan makanan baik yang disertai dengan fasilitas tempat menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan catering. Subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, kecuali dari objek pajak restoran adalah pelayanan jasa boga dan catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah atau pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak hiburan adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai adanya cakupan yang luas dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua yang menyelenggarakan reklame meliputi : reklame papan, reklame kain, reklame melekat,

reklame selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

5) Pajak Penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan pengguna tenaga listrik.

6) Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c, maksud eksploitasi adalah pengantian dan pengolahan bahan galian golongan c dari sumber alam, di dalam dan di luar permukaan alam untuk dimanfaatkan. Objek pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah asbes, pasir, kerikil, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah orang atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c, dasar pengenaan pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang dipungut bayaran, Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

c. Unsur-unsur Pajak Daerah

Unsur-unsur pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan dalam pajak propinsi dan pajak kabupaten atau kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1) Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua hak perbedaan sepihak atau tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan kedalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan motor.

Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap dan digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah atau permukaan.

Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan atas air di bawah tanah dan air dipermukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak hiburan
- c) Pajak restoran
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengolahan bahan galian golongan c
- g) Pajak parkir

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2002 : 2) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak di sini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memasukan uang yang serbanyak-banyaknya kedalam kas Negara atau daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

2) Fungsi *regureled*

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan negara atau daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgeter* pajak daerah, khususnya untuk mengisi kas Negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pemerintahan pusat atau daerah.

c. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa : Pajak Daerah

ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- 1) Nama, objek, subjek pajak dan wajib pajak
- 2) Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak
- 3) Masa pajak, saat terutang dan surat pemberitahuan pajak
- 4) Pemungutan pajak
- 5) Sanksi administrasi
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan
- 7) Keberatan dan banding
- 8) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
- 9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 10) Kadaluwarsa penagihan
- 11) Pembukuan dan pemeriksaan
- 12) Ketentuan khusus
- 13) Penyidikan
- 14) Ketentuan pidana.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2010 Bab I pasal (1) menyatakan yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

b. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2010 Bab V Pasal 8, tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat pemerintahan, yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu :

- a) Retribusi jasa umum
- b) Retribusi jasa usaha

c) Retribusi perizinan tertentu

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari keuntungan/ laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

c. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Widodo (dalam buku Abdul, 2004:152) menyatakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Untuk pemerintahan daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dipotong dengan

biaya pemungutan lebih kecil dari pada anggaran yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang dari sektor pajak reklame yaitu :

- 1) Memperluas basis penerimaan.
- 2) Memperkuat proses pemungutan.
- 3) Meningkatkan pengawasan.
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

d. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul (2004: 96) menyatakan bahwa : Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber pendapatan asli daerah agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak daerah, yaitu :

1) Kriteria Hasil (*yield*)

Kriteria hasil yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

2) Kriteria Keadilan (*equity*)

Dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Pajak/retribusi haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3) Kriteria Efisiensi ekonomi (*economic efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi. Mencegah jangan sampai pilihan

konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.

4) Kriteria Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*)

Suatu pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah) haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha. Dalam hal ini suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.

5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue source*)

Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2003 : 5) ada dua macam metode yang biasa digunakan dalam penelitian ini yaitu ;

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain atau bersifat menjelaskan tanpa membuat suatu perbandingan antara variabel.

2. Tingkat Ekplanasi

Penelitian Ekplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan alasan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat menjelaskan tanpa membuat satu perbandingan antara variabel.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di jalan Merdeka N0.21 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Besarnya penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.	a. Realisasi pajak reklame b. Realisasi penerimaan pajak daerah
2	Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah	Tata cara yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	a. Memperluas basis penerimaan b. Memperkuat proses pemungutan c. Meningkatkan pengawasan d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Sumber : Penulis, 2012

D. Data yang Diperlukan

Menurut Mujdarat (2003 : 127) sumber data penelitian terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (tidak diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan bagian pendapatan asli daerah kota Palembang mengenai pajak reklame dan data sekunder berupa :

- a. Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame
- c. Data Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2011
- d. Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008-2011
- e. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2011

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin Alih Bahasa W.Gulo (2002 : 122-124) menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

3. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

4. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

5. Kuisisioner (angket)

Kuisisioner adalah media atau perantara daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung pada responden.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan langsung di dinas pendapatan daerah kota Palembang kepada yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data menurut M. Iqbal (2002 : 32), menyatakan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka-angka yang dapat diukur dengan rumus.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dan Analisis kuantitatif yaitu menghitung kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang memusatkan perhatian pada suatu yang ada dengan pengumpulan, mencatat, mengklasifikasikan serta menganalisis dan menjadikan data yang diperoleh sehingga dapat mengambil suatu kesesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang ditemukan pada tempat penelitian.

Rasio kontribusi dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975, dimana sebelumnya bidang pajak dan retribusi pada Daerah Tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Daerah masing-masing, yang dibentuk dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksanaan pemerintah daerah yang bertempat di kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (Dispenda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990, kemudian Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk



serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi dinas pendapatan daerah kota Palembang.

2. Ruang Lingkup Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari dinas pendapatan daerah kota Palembang adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggungjawab dan wewenang dinas pendapatan daerah kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknik, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran, pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

- e. Melakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan daerah
- f. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya
- g. Melakukan penyuluhan mengenai daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- h. Melakukan urusan tata usaha

3. Struktur Organisasi Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dinas pendapatan daerah. Susunan organisasi dinas pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Kepala dinas
- 2) Wakil kepala dinas
- 3) Bagian tata usaha, membawahi :
 - a) Sub bagian umum
 - b) Sub bagian kepegawaian
 - c) Sub bagian keuangan

- 4) Sub dinas program, membawahi :
 - a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c) Seksi pengembangan pendapatan
 - d) Seksi evaluasi dan pelaporan
- 5) Sub dinas pendataan dan penetapan
 - a) Seksi pendataan dan pendaftaran
 - b) Seksi pengolahan dan informasi
 - c) Seksi penetapan
 - d) Seksi pemeriksaan
- 6) Sub dinas penagihan
 - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
 - b) Seksi penagihan dan perhitungan
 - c) Seksi retribusi dan pemindah bukuan
 - d) Seksi perimbangan dan keberatan
- 7) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain
 - a) Seksi penerimaan pajak
 - b) Seksi penerimaan retribusi
 - c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
- 8) Kelompok jabatan fungsional
- 9) Sub dinas bagi hasil pendapatan
 - a) Seksi bagi hasil pajak
 - b) Seksi bagi hasil bukan pajak

c) Seksi pemantauan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

10) Cabang dinas

11) Unit pelaksanaan teknis dinas

b. Pembagian Tugas

1) Kepala Dinas

a) Tugas

Melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas dan dekonsentralisasi di bidang pendapatan daerah

b) Fungsinya :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja
2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
3. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan
4. Pengkoordinasi yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengalaman teknis atau pelaksanaan yang

ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Kepala Dinas

a) Tugas

Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan

b) Fungsi :

1. Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat
2. Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas
3. Penandatanganan administrasi sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas

3) Bagian Tata Usaha

a) Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lainnya Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lainnya

b) Fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

3. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan

4. Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan

c) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga

2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan

4. Sub Dinas Program

a) Tugas

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah

b) Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program kerja
2. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan daerah
3. Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

c) Sub dinas program terdiri dari :

1. Seksi penyusunan program dan penyuluhan

Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan

2. Seksi pemantauan dan pengendalian

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah

3. Seksi pengembangan pendapatan

Seksi pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah

4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

a) Tugas

Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan

b) Fungsi :

1. Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib pajak
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah

c) Sub dinas pendataan dan penetapan terdiri dari :

1. Seksi pendataan dan pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak

2. Seksi Pengelolaan data dan informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak

3. Seksi Penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak

4. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek, objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan

6. Sub Dinas Penagihan

a) Tugas

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan keberatan.

b) Fungsi :

1. Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan, pembayaran, penyeteran pajak dan retribusi daerah.
2. Penata usahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.
3. Pembukuan piutang pendapatan daerah.
4. Retribusi pemindah bukuan dan rekonsiliasi.
5. Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
6. Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

c) Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah, penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan tambahan pajak/retribusi daerah.

2. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Retribusi dan Pemindah-bukuan

Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah-bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

4. Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk menyelesaikan pengadaan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

7. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

a) Tugas

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan syarat-surat berharga.

b) Fungsi

1. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
2. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
4. Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi.

c) Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan Pajak

Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pajak.

2. Seksi Penerimaan Retribusi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

3. Seksi Penerimaan Pendapatan lain-lain

Seksi penerimaan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pengolahan penerimaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah.

4. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga

Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang teknologi, serta perbendaharaan.

b) Fungsi :

1. Melaksanakan tugas fungsional di bidang komputer dalam perekapan data-data
2. Melaksanakan urusan perbendaharaan.

9. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

a) Tugas

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

b) Fungsi :

1. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, melakukan penerimaan bagi hasil pajak
2. Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
3. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

c) Sub Dinas Hasil Pendapatan terdiri dari :

1. Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak

2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak

3. Seksi Peraturan Peundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan

menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan

10. Cabang Dinas

a) Tugas

1. Cabang dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas
2. Cabang dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas

b) Fungsi

1. Melaksanakan unsur teknis operasional
2. Melaksanakan urusan administrasi

c) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- 1) Kepala Cabang Dinas
- 2) Unsur Staf/Petugas Administrasi
- 3) Unsur lain/Petugas Teknis Operasional

11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

a) Tugas

1. Unit pelaksana teknis dinas merupakan pelaksana teknis operasional dinas
2. Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas
3. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, di satu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah



b) Fungsi

1. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya
2. Pelaksanaan urusan administrasi

c) Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terdiri dari :

1. Kepala
2. Unsur Staf/Petugas Administrasi
3. Unsur lain/Petugas Teknis Operasional
4. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Hubungan Kerja

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi dinas pendapatan daerah tingkat II Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan tugasnya kepala dinas bertanggungjawab kepada gubernur kepala daerah
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas berada dibawah koordinasi administrasi sekretasis wilayah daerah
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi-instansi lain di luar dinas
- 4) Setiap pemimpin kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada atasannya.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik di

lingkungan dinas, maupun di luar dinas yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya

Pemerintah kota Palembang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota serta seorang Sekretaris Daerah. Pemerintah kota Palembang dalam pengembangan organisasi berpedoman pada :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II kotapraja di propinsi Sumatera Selatan
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah
- 4) Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang perubahan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi lembaga teknis daerah

Pemerintahan kota Palembang dalam menjalankan roda pemerintahan baik kegiatan maupun pembangunan memiliki 19 Dinas, 3 Badan, dan 3 Kantor. Pemerintah Dinas, Badan dan Kantor tersebut berdasarkan pada peraturan daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemerintah harus mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik lingkungan dinas maupun lingkungan luar dinas yang berhubungan dengan bidang dan tugas yang dijalankan.

Sumber dana pemerintah kota Palembang melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat. Instansi yang bertugas sebagai koordinator pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah.

4. Visi dan Misi Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah pendapatan daerah yang maksimal untuk pembangunan kota Palembang yang merupakan cara pandang ke depan agar tetap eksis dan inovatif.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

- a) Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah
- b) Menggali Potensi pendapatam daerah
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak
- d) Modernisasi pajak

5. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

a. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dalam perencanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai yakni :

- 1) Terwujudnya pendapatan daerah yang maksimal
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di bidang pajak

b. Sasaran

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah :

- 1) Meningkatkan penerimaan pajak dari tahun lalu
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pajak
- 3) Meningkatkan pelaporan yang disusun tepat waktu

c. Kebijakan

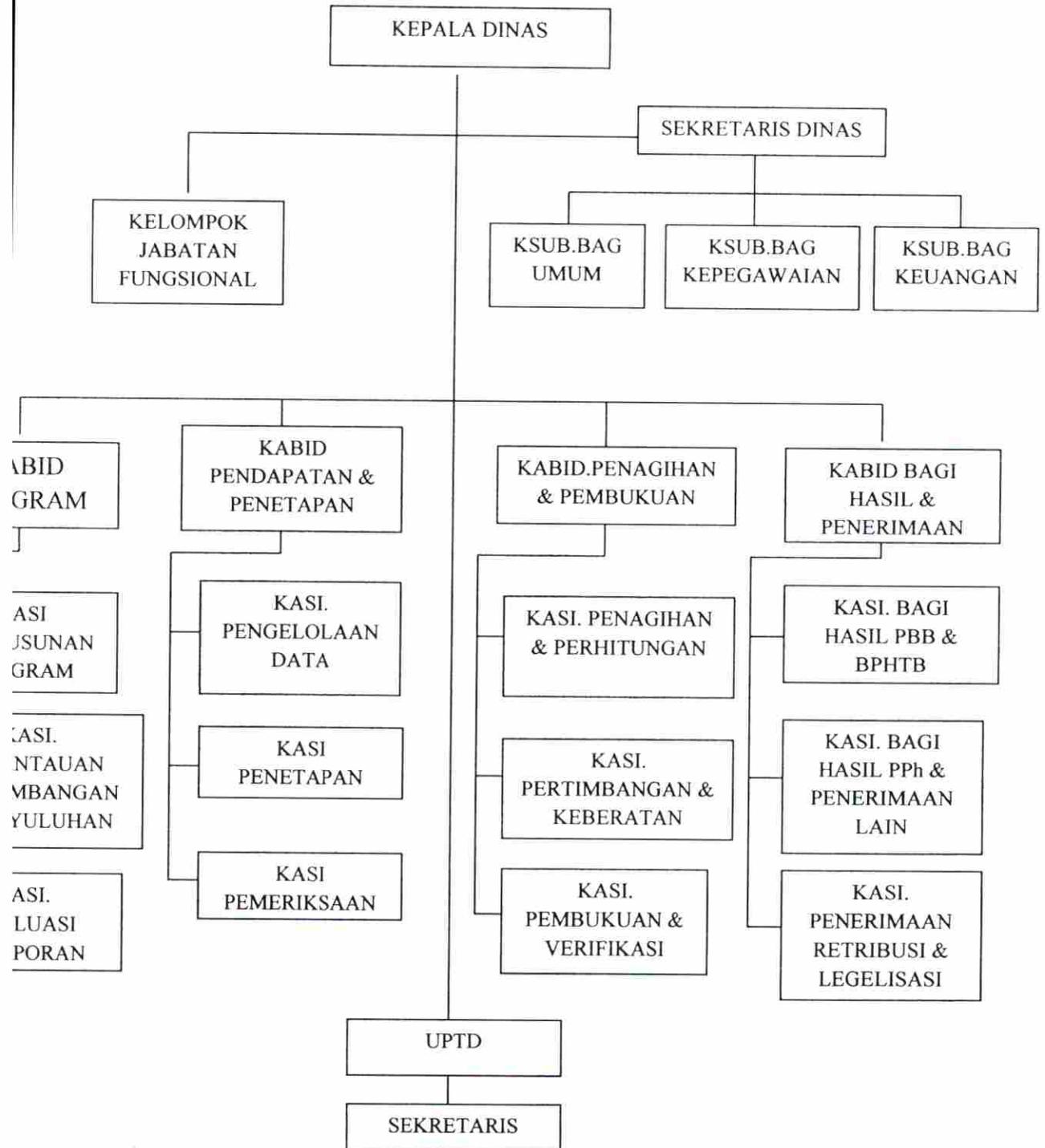
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana pada perencanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah, maka ditetapkan kebijakan yakni :

- 1) Mengutamakan intensifikasi pada penerimaan pajak yang belum mencapai target
- 2) Pengembangan potensi pendapatan daerah diarahkan ke jenis objek pajak daerah yang baru

Gambar IV.1

Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang perlu ditingkatkan kontribusinya. Kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam risiko kontribusi yaitu perbandingan antara pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah.

a. Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Kota Palembang

Anggaran dan realisasi pajak reklame kota Palembang periode tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut :

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{a) } &= \frac{\text{Rp. } 4.138.404.435}{\text{Rp. } 4.750.000.000} \times 100\% \\ &= 87.12\% \end{aligned}$$

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{b) } &= \frac{\text{Rp. } 4.225.282.834}{\text{Rp. } 5.250.000.000} \times 100\% \\ &= 80.48\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{c) } &= \frac{\text{Rp. } 4.603.540.213}{\text{Rp. } 6.500.000.000} \times 100\% \\ &= 70.82\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{d) } &= \frac{\text{Rp. } 7.937.771.136}{\text{Rp. } 5.121.951.765} \times 100\% \\ &= 154.98\% \end{aligned}$$

Tabel IV.2

Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2008-2011

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	4.750.000.000	4.138.404.435	87,12
2009	5.250.000.000	4.225.282.834	80,48
2010	6.500.000.000	4.603.540.213	70,82
2011	5.121.951.765	7.937.771.136	154,98

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2012

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai kontribusi pajak yang berasal dari pajak daerah di kota Palembang dari tahun 2008-2011 cenderung menurun. Pada tahun 2008 nilai kontribusi pajak reklame sebesar 87,12 persen, penerimaannya termasuk kedalam golongan tidak efektif. Tahun 2009 nilai kontribusi pajak reklame mengalami penurunan menjadi 80,48 persen, sehingga penerimaannya termasuk kedalam golongan tidak efektif.

Pada tahun 2010 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 70,82 persen sehingga penerimaannya termasuk golongan tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 nilai kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 154,98 persen, sehingga penerimaannya termasuk kedalam golongan efektif.

Ketidakefektifan penerimaan pajak reklame pada tahun 2008, 2009, dan 2010 disebabkan penetapan target yang tidak realistis karena belum memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak reklame yang sudah dikategorikan efektif dikarenakan pemungutan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah, pembayaran pajak reklame melalui penerimaan pajak daerah yang dibebankan pada pemakaian reklame yang disediakan oleh DIPENDA dan data wajib pajak pula tersedia secara otomatis.

b. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang

Tabel IV.3

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Palembang Tahun 2008-2011**

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	69.350.000.000	69.367.592.779	100,03
2009	87.485.932.360	84.696.563.176	96,81
2010	93.420.835.800	104.047.313.437	111,37
2011	172.117.431.035	207.746.349.410	120,70

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2012

Berdasarkan tabel IV.2 dan IV.3 nilai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang dari tahun 2008 – 2011 dapat dinyatakan dalam persentase yang dapat dicari dengan rasio kontribusi yaitu:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan demikian peranan pajak reklame terhadap jumlah penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{a)} &= \frac{\text{Rp. 4.138.404.435}}{\text{Rp.69.367.592.779}} \times 100\% \\ &= 5.97\% \end{aligned}$$

Berdasarkan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kota Palembang tahun 2008 yaitu sebesar 5.97%.

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{b)} &= \frac{\text{Rp. 4.225.282.834}}{\text{Rp.84.696.563.176}} \times 100\% \\ &= 4.99\% \end{aligned}$$

Rasio kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kota Palembang pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,99%. Angka tersebut menunjukkan besarnya sumbangan yang diberikan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah pada tahun 2009. Rasio ini mengalami

penurunan sebesar 0.98% dibandingkan dengan rasio kontribusi Pajak Reklame tahun 2008.

Tahun 2010

$$c) = \frac{Rp. 4.603.540.213}{Rp.104.047.313.437} \times 100\%$$

$$= 4,42\%$$

Rasio kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kota Palembang pada tahun 2010 yaitu sebesar 4.42%. Angka tersebut menunjukkan besarnya sumbangan yang diberikan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah pada tahun 2010. Rasio ini mengalami penurunan sebesar 0,57% dibandingkan dengan rasio kontribusi Pajak Reklame tahun 2009.

Tahun 2011

$$d) = \frac{Rp. 7.937.771.136}{Rp.207.746.349.410} \times 100\%$$

$$= 3.82\%$$

Rasio kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kota Palembang pada tahun 2011 yaitu sebesar 3.82. Angka tersebut menunjukkan besarnya sumbangan yang diberikan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah pada tahun 2011. Rasio ini mengalami

penurunan sebesar 0,6% dibandingkan dengan rasio kontribusi Pajak Reklame tahun 2010.

Tabel IV.4
Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2008-2011

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pajak Daerah	%
2008	4.138.404.435	69.367.592.779	5.97%
2009	4.225.282.834	84.696.563.176	4.99%
2010	4.603.540.213	104.047.313.437	4.42%
2011	7.937.771.136	207.746.349.410	3.82%

Sumber : Penulis, 2012

2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Untuk pemerintahan daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah

dipotong dengan biaya pemungutan lebih kecil dari pada anggaran yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang dari sektor pajak reklame yaitu :

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain dengan mempercepat penyusunan Peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

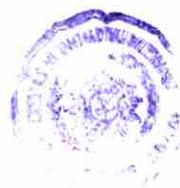
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kontribusi yang diberikan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang, pada tahun 2008 sebesar 5,97%, pada tahun 2009 sebesar 4,99%, pada tahun 2010 sebesar 4,42% serta pada tahun 2011 kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 3,82%. Penurunan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah ini disebabkan karena besarnya penerimaan dari jenis-jenis pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dan Pemerintah kota Palembang dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang dari sektor pajak reklame yaitu : Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.



B. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka diberikan saran-saran dalam menganalisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Dinas pendapatan daerah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, agar dapat meningkatkan kontribusi dari sektor pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dalam membangun suatu daerah yang lebih baik kedepannya dan Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan PAD yang ideal diharapkan melakukan perbaikan administrasi PAD, yaitu perbaiki perlengkapan pendapatan dan organisasi untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Dirga Tudes. 2007. **Analisis Ketidak Efektifan Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palembang**, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dasril Munis. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marihot P.Siahaan, 2006. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian Ekonomi**, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 **Tentang Pajak Reklame**.
- Siti Resmi. 2009. **Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2003 . **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3619/D/T/K-II/2010

: No. 3620/D/T/K-II/2010

: No. 3377/D/T/K-II/2009

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)

No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)

No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Agustus 2012
Waktu : 12.45 s/d Selesai
Nama : Fenny Anggraini
NIM : 222008181
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor-Publik
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

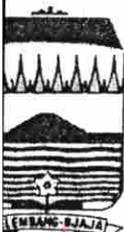
NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Pembimbing	8/9/2012	
2	Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	20-09-2012	
3	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Anggota Penguji I	8/9/2012	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Anggota Penguji II	7/9/2012	

Palembang, September 2012
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. Sunardi, SE, M.Si
NIDN/NBM : 02060436303/784021





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Faximili(0711)317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : wwdispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 982 /PENDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. BUKMAN LIAN, MM,M.Si
J a b a t a n : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Fenny Anggraini
NIM : 22 2008 181

Telah melaksanakan Pengambilan Data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 30 Juli 2012


A. R. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG
Sekretaris

Drs. H. BUKMAN LIAN, MM.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 195807161979121002

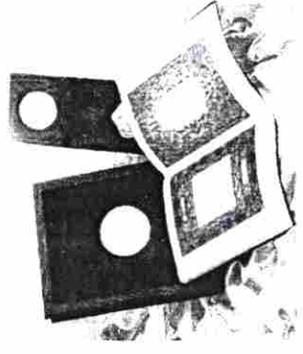


158/J-10/FE-UIMP/SHA/IV/2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

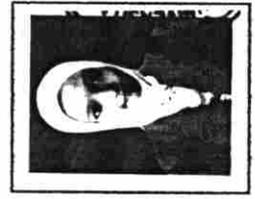
NAMA : FENNY ANGGRAINI
NIM : 222008181
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 09 April 2012

an. Dekan



Pembantu Dekan IV



(Signature)

Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami

BIODATA PENULIS

Nama : FENNY ANGGRAINI
Nim : 22 2008 181
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Balap Sepeda muhajirin IV Rt. 43
Rw.13 No.5005
Nomor Telpn : 089686693171
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua
1. Ayah : Muhammad Nur
2. Ibu : Sulmiati
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Balap Sepeda muhajirin IV Rt.43
Rw 13 No.5005

Palembang, Agustus 2012

Penulis,

FENNY ANGGRAINI